

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan hasil pemilu 1999 dengan menggunakan model Laakso-Taagepera (1979) dan klasifikasi Duverger (1954) dan Coppedge (1999) adalah bentuk sistem kepartaian yang bercorak multipartai yang moderat dengan ENPP 4.72, sedangkan dari hasil pemilu 2004 diketahui berganti menjadi sistem kepartaian multipartai ekstrim dengan ENPP 7.07. Berdasarkan acuan pada aspek tipologi numerik (numerical typology) sesungguhnya jumlah partainya sudah berkurang dari 48 pada tahun 1999 menjadi 24 pada tahun 2004, namun dengan menggunakan rumusan ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties) angkanya justru meningkat.
2. Terjadi fenomena yang paradoks yaitu jumlah partai yang efektif berada di parlemen naik dari lima partai pada tahun 1999 menjadi tujuh partai pada tahun 2004, sehingga berdasarkan model dari Laakso-Taagepera (1979) hasil pemilu 1999 menunjukkan sistem lima partai sedangkan pada pemilu 2004 menunjukkan sistem tujuh partai.
3. Fenomena yang menonjol yaitu proses fragmentasi dalam sistem partai politik yang makin meluas atau makin besar. Atau dengan perkataan lain derajat keterbelahannya (fragmentasi) pun menjadi makin buruk. Hal ini bertolak

belakang dengan pendapat umum bahwa semakin sedikit partainya dalam suatu sistem multipartai maka akan semakin rendah fragmentasinya.

4. Sedikit atau banyaknya jumlah partai, belum merupakan indikator baik buruknya suatu sistem kepartaian; yang perlu diketahui berapa jumlah partai yang efektif di dalam parlemen dan seberapa luas derajat fragmentasinya.
5. Secara umum dari penelitian terhadap hasil pemilu 1999 dan 2004, diketahui bahwa tingkat ENPP-nya di Indonesia masih tinggi (ENPP 4.72 -7.07) atau tingkat kemajemukan keparpolannya masih tinggi dan derajat fragmentasi-nya (F 0.79 - 0.86) juga tinggi

Sebagai perbandingan, berdasarkan penelitian pada hasil pemilu di Inggris tahun 2005, ternyata ENPP-nya rendah sebesar 2.46. Demikian pula derajat fragmentasinya rendah sebesar 0.59, meskipun jumlah partainya sangat banyak yaitu 58 partai politik. Ternyata dari 58 partai politik yang ikut pemilu di Inggris pada tahun 2005 hanya 12 yang masuk parlemen dan sistem kepartaiannya didominasi oleh dua partai utama yaitu Partai Buruh (55.1%) dan Partai Konservatif (30.65%) yang silih berganti memegang kekuasaan, disamping ada partai ketiga yaitu partai Liberal Democrat (9.59%).

Dengan demikian banyaknya partai tidak selalu buruk atau lebih fragmen atau sedikitnya partai tidak selalu lebih baik dan lebih rendah fragmentasinya dalam konteks sistem kepartaian yang multipartai. Yang paling utama harus diketahui adalah berapa jumlah partai yang efektif dan berapa derajat fragmentasinya. Namun, patut diberi catatan untuk mencapai hasil evaluasi yang lebih komprehensif, masih memerlukan bantuan penelitian atas indikator-indikator lain termasuk indikator-indikator yang lebih kualitatif.

6. Bahwa klaim teori Scott Mainwaring (1990) bahwa sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai merupakan penggabungan yang bermasalah, memang terbukti terjadi di Indonesia terutama pasca pemilu 2004. Tersendatnya penerapan sistem presidensial di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah partai politik, yang menjadi “sumber kekacauan”, akan tetapi memang sistem presidensial dan sistem multipartai apalagi ekstrim bagaikan “perkawinan paksa” yang sulit dikelola.
7. Sejalan dengan upaya mewujudkan peningkatan Ketahanan Nasional, pendekatan pengukuran tingkat kemajemukan partai politik dan derajat fragmentasi di atas dapat dianggap sebagai suatu sumbangan dalam mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat efektifitasnya sistem multipartai memberikan sumbangan positif bagi gatra politik dari asta-gatra Ketahanan Nasional dan makin rendah derajat fragmentasinya sistem multipartai maka akan makin rendah potensi ancaman bagi gatra politik dan gatra pertahanan dan keamanan dari asta-gatra Ketahanan Nasional.

B. Saran :

1. Indonesia sebagai negara yang masih membangun kehidupannya atau masih dalam tahapan proses demokratisasi, dan corak masyarakatnya yang majemuk, tidak akan terhindar dari munculnya partai-partai baru. Oleh karena itu disarankan agar secara bertahap dilakukan pendidikan politik yang meluas, agar masyarakat lebih cerdas dalam menjatuhkan pilihannya.

2. Dalam perjalanan waktu, dengan makin meningkatnya peranan informasi dan komunikasi maka kecerdasan politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat pun akan makin meningkat, sehingga secara cerdas agar pilihan rakyat akan semakin mengerucut kepada beberapa partai-politik yang mapan saja. Pada gilirannya pada pemilu mendatang jumlah partai politik akan berkurang secara alamiah, yang ditandai dengan semakin berkurangnya partai yang masuk parlemen/DPR.

Dari sejumlah partai politik yang semakin terbatas yang masuk parlemen, disarankan agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan politik, agar dapat lahir sejumlah partai yang dominan yang tentunya terbatas jumlahnya.

3. Sistem kepartaian majemuk agar tetap dipertahankan, namun supaya lahir sejumlah partai dominan yang memainkan peran lebih besar. Dengan lahirnya beberapa partai dominan, maka mereka dapat memainkan peran lebih besar sehingga dapat mengubah bentuk sistem kepartaian yang terbangun, yang pada gilirannya hubungan dengan sistem pemerintahan presidensial akan berubah coraknya. Dari perkembangan ini kemungkinan Scott Mainwaing akan memodifikasikan teorinya bahwa sistem presidensial dan sistem multipartai dapat merupakan gabungan yang berjalan, yaitu dengan hadirnya beberapa partai dominan dalam sistem kepartaian multipartai atau lebih ideal lagi apabila ada partai pemenang pemilu yang menguasai suara diatas 51%.
4. Untuk pemilu yang akan datang perlu dikaji kemungkinan penyelenggaraan pemilu yang serentak antara pemilu legislatif (pileg) dengan pemilu presiden (pilpres). Semakin serentak pemilu tersebut, maka akan semakin sederhana sistem kepartaian yang terbangun dan akan semakin kuat sistem presidensialnya.

Karena partai politik pemenang pileg kemungkinan besar pula menjadi pemenang pilpres.

5. Setidaknya kedua pendekatan pengukuran ENPP dan Fragmentasi dapat berperan sebagai alat atau sistem peringatan dini (*early warning systems*) atau semacam radar dalam mengatasi AGHT dalam perjuangan mewujudkan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pada masa depan diharapkan kinerja sistem kepartaian secara bertahap menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional yang merupakan konsepsi dasar Ketahanan Nasional.

